BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital ini, berbagai bidang masyarakat mulai berubah dan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi. Saat ini, hampir setiap industri menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, termasuk keuangan. Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi yang dihadirkan oleh sektor keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan bagi masyarakat luas. Di Indonesia, sektor pembayaran memiliki tingkat pertumbuhan FinTech tertinggi, dan metode pembayaran menjadi salah satu faktornya. Metode pembayaran digital (cashless) merupakan metode pembayaran yang sangat populer di kalangan masyarakat umum saat ini.

Menurut survei Hootsuite dan *We Are Social*, total pengguna internet di Indonesia per Januari 2021 hingga 202,6 juta, mengalami peningkatan 15,5% atau 27 juta dari tahun sebelumnya (Ariesanti, 2021). Mengacu pada jumlah penduduk Indonesia sebesar 274,9 juta, pemakai internet Indonesia menggapai 73,7%. Menurut catatan survei, 345,3 juta orang menggunakan perangkat ini sebagai jumlah pengguna internet yang menggunakan perangkat smartphone Indonesia. Angka inipun mewakili 125,6% dari jumlah populasi. Seiring adanya peningkatanpengguna internet melalui smartphone, demikian pula penggunaan metode pembayaran nontunai berbasis server di masyarakat.

Cashless society adalah evolusi sosial yang tak terhindarkan. Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran dinilai menimbulkan kesulitan, terutama yang berkaitan dengan biaya penanganan uang tunai, bahaya perampokan/pencurian, kesehatan, kenyamanan, dan peredaran uang palsu.Pada era digital sekarang ini, tuntutan kemudahan bertransaksi berdasarkan minat dan kebutuhan masyarakat sudah mulai mengubah uang tunai yang digunakan dalam sistem bertransaksi non tunai. Dengan sistem berbayardengan tidak lagi menggunakan uang tunai, penipuan dan pencurian merajalela, sehingga anda dapat berdagang tanpa harus membawa banyak uang. Keunggulan lain dari sistem pembayaran non tunai ini adalah transaksi dapat diselesaikan dengan cepat karena pengguna tidak perlu menyiapkan pecahan untuk ditukarkan dengan uang kembalian, sehingga transaksi dapat diselesaikan dengan cepat.

QRIS diperkenalkan pada 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. QRIS adalah standar pembayaran kode QR untuk sistem pembayaran Indonesia. Pengenalan QRIS juga melambangkan tujuan Indonesia untuk sistem pembayaran pada tahun 2025. Tagline QRIS, UNGGUL (Universal, Easy, Profit, dan Direct), berjanji untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan mendorong UMKM. Hal ini dapat mendorong kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia. Semangat ini sejalan dengan tema HUT RI ke-74, Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Sejahtera. (Agung et al., 2020)

Untuk mendorong penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis kode ini, Bank Indonesia mengundang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). QRIS menghilangkan kebutuhan UMKM untuk memiliki banyak kode QR dalam

bisnisnya, karena kode QR standar dapat digunakan untuk membayar kode QR dari berbagai penyedia layanan sistem pembayaran. Ini menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar, berbagai kartu e-money, dan rekening. dompet elektronik terpisah dalam transaksi. Dengan menggunakan *barcode* keuangan akan lebih cepat dan lebih transparan.

Berdasarkan dokumen yang diterbitkan Bank Indonesia pada 30 Desember 2020, QRIS mengembangkan koneksi dengan sekitar 5,8 juta lokasi ritel di Indonesia. Sejak 22 Maret 2020, jumlah ini naik 88 persen atau sebanyak 3,1 juta pengguna merchant. Mayoritas pengguna QRIS adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berkisar dari perusahaan kecil hingga 3,6 juta. Peningkatan tertinggi penggunaan QRIS di usaha kecil berasal dari 304.400 pada 22 maret 2020, mengalami peningkatan sebesar 316%. Selain itu, 310.700 pengguna QRIS adalah perusahaan besar, 558.500 menengah, dan 14.700 adalah donor/organisasi sosial(Hutagalung et al., 2021).

Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, menyatakan sektor perdagangan dan UMKM dapat mendorong perekonomian daerah untuk mengantarkan era kehidupan baru melalui sistem transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS, sehingga mendorong percepatan dan perluasan pemanfaatan QRIS di Pulau Dewata, khususnya di Kabupaten Klungkung (Redaksi9.id, 2022)

QRIS banyak digunakan oleh usaha mikro dan kecil atau UMKM. Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, mengatakan per 1 Oktober 2021 terdapat 330.282 merchant QRIS di Provinsi Bali

(Bali.Bisnis.com, 2021). Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pedagang dalam kategori usaha mikro dengan pangsa 52,7%. Salah satu kabupaten di Bali yang menggalakkan penggunaan QRIS pada UMKM adalah Kabupaten Klungkung. Dikutip dari situs resmi Pemkab Klungkung, setidaknya 1.755 atau sekitar 2% UMKM menggunakan metode pembayaran QRIS. Namun jumlah tersebut masih sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali seperti Kabupaten Denpasar yang mencapai 88.238 atau 49% dan Kabupaten Badung sebanyak 49.497 atau 28%. Dengan persentase yang rendah dibandingkan kota Denpasar dan Badung, Kabupaten Klungkung terus memperluas penggunaan QRIS di sektor UMKM. Dan perlu mempelajari implementasi sistem pembayaran QRIS.

Nusa Penida termasuk wilayah Kabupaten Klungkung. Kawasan yang manaandalan perekonomiannya disektor pariwisata, UMKM, pertanian dan kerajinan, yang mana UMKM merupakan penyedia lapangan kerja kedua setelah pariwisata bagi warga Nusa Penida. Dikutip dari website resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan ketika Festival Semarapura di Klungkung tahun 2019 bahwa Nusa Penida merupakan salah satu poros pembangunan termasuk sektor UMKM. Di wilayah yang mencakup dua pertiga wilayah Klungkung, Nusa Penida memegang peranan penting di Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, Bupati Suwirta dan Pemerintah Kabupaten Klungkung mendukung penuh peluncuran aplikasi ORIS. Menurutnya, fungsi QRIS akan membawa manfaat baik bagi nasabah maupun UMKM (Klungkungkab.go.id, 2022). Pelanggan bisa bertransaksi secara*fleksibel*,

tergantung pada sumber dana di *e-wallet* mereka dan bisa melakukan pembayaran semakin mudah melalui pemindaiansaja dan membayar.

Penggunaan QRIS sebagai langkah baru pada sistem bertransaksi. Peluncuran yang bisa dibilang baru ini menuai pro dan kontra masyarakat. Menurut kutipan pada situs Warta Ekonomi, pengenalan sistem ini disambut positif oleh toko anggota dan pengguna (konsumen), tetapi di sisi lain, kenyamanan dan keamanan sistem pembayaran inipun masih dipertanyakan. Sistem pembayaran dengan QRIS telah menciptkan polemik dikalangan masyarakat dan pedagang.

Jika dilihat dari sisi masyarakat, sistem ini masih perlu sosialisasi cara penggunaannya, karena masyarakat masih cenderung memilih sistem pembayaran tunai dibandingkan virtual atau non tunai. Di sisi merchant, penerapan QRIS masih dianggap mengganggu merchant dengan diperkenalkannya Merchant Discount Rate (MDR) yang membutuhkan biaya 0,7% dari seluruh transaksi. MDR adalah biaya yang dinilai oleh bank penyedia layanan QRIS atas semua transaksi terkait QRIS. Selain itu, menurut Shintia Xu, Head of Fore Business Marketing, menetapkan standar MDR di 0,7% sangat menguntungkan karena pemilik merchant tidak perlu menawar dengan penyedia layanan QRIS untuk mengurangi MDR(Agung et al., 2020).

Mempertimbangkan beberapa masalah yang terjadi di bidang penerapan sistem pembayaran QRIS, sistem ini merupakan inovasi yang menarik untuk dievaluasi guna menunjukkan apakah sistem ini memberikan kenyamanan kepada pelanggan atau mungkin merugikan mereka, khususnya para pedagang. Kajian ini

akan fokus pada implementasi QRIS di kalangan UMKM di Kecamatan Nusa Penida.

Penggunaan QRIS pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida didasarkan pada permasalahan yang ditemui di lapangan. Menurut pelaku UMKM dalam wawancara awal bahwa UMKM di Kecamatan Nusa Penida sebelum menggunakan QRIS sering mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi dimana harus mempersiapkan uang kembalian dan masih melakukan pencatatan transaksi secara manual. Maka dari itu pelaku usaha berinisiatif untuk menggunkan metode pembayaran QRIS. Agar dapat melakukan transaksi lebih mudah dan efisien.

Hasil temuan kajian Agung (2020) mengungkapkan penggunaanQRIS untuk membuat peningkatan akuntabilitas tata kelola yang baik di Pura Jagatnata Singaraja dinyatakan kurang efektif sebabminimnya sosialisasi, pola pikir pemedek yang tradisional juga minimnya nilai spiritual yang ada, dengan begitu tidak bisa membuat meningkat dengan signifikan. Temuan Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramanani, dan Suci Rahmayanti (2020) mempertimbangkan penggunaan QRIS terhadapUMKM di Medanjuga menjelaskan peran, keterbatasan, dan penghasilan UMKM melalui penggunaan QRIS, yang menunjukkan bahwa QRIS membawa manfaat bagi UMKM di Medan. Menurut studi Setiawan dan Mahuni (2020), UMKM secara positif mengakui QRIS selaku alternatif metode bertransaksi yang tidak sulit serta bisameminimkan terjadinya kontak fisik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pembayaran QRIS kepada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida sebagai sistem

pembayaran di era digital, mengkaji kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini baru karena menguji efektivitas penggunaan aplikasi QRIS untuk pelaku UMKM di wilayah Nusa Penida. Ini merupakan tahap awal implementasi QRIS dan implementasi digitalisasi ekonomi pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida, dimana Nusa Penida merupakan salah satu pilar ekonomi di sektor UMKM disamping sektor pertanian dan pariwisata. Kajian ini memberikan pemahaman kepada pembaca tentang implementasi sistem pembayaran QRIS bagi UMKM di kawasan Nusa Penida di era digital dengan mengkaji peran, hambatan, dan evaluasi efektivitas penerapan sistem pembayaran QRIS bagi UMKM di Kecamatan Nusa Penida.Brlandaskan latar belakang dan masalah yang dipaparkansehingga pengkaji mengambil topik berikut yang hendak diujikan yaitu "**Analisis Penerapan Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard*(QRIS) Pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung"**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan penjelasan latar belakang, terdapat permasalahan dalam penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Kajian studi sebelumnya melaksanakan kajian terkait QRIS dan mengarah kepada wilayah tertentu ataupun kondisi tertentu di mana sistem QRIS bisa dijalankan positif bagi aktivitas transaksi nontunai di UMKM. Studi lain menunjukkan bahwasanya sistem QRIS tidak bisa diterapkan sebab minimnya pengertian umum terkait sistem pembayaran nontunai berbasis digital misalnya QRIS.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan pengidentifikasian permasalahan penelitian, sehingga kajian studi ini berfokuskan terhadap topik pengidentifikasian peranan, kendala dan pengevalusiasn efektivitas penggunaan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida dalam penerapan QRIS di Kabupaten Klungkung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida?
2. Apakah kendala penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida?
3. Bagaimana efektivitas penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya kajian studi ini mampu memberi dua kegunaan, yakni.

1. Manfaat Teoritis:

   Dalam hal penerapan sistem pembayaran QRIS bagi pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang untuk kontribusi pengetahuan, wawasan, informasi, dan referensi lebih lanjut, khususnya bagi penulis dan pelaku UMKM.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Mahasiswa

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi penulis sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

   b. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini dapat dijadikan contoh oleh pemerintah dalam merumuskan strategi untuk mendorong pertumbuhan digitalisasi, khususnya di sektor pembayaran berbasis digital.

c. Bagi Bank Indonesia

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai penilaian berdasarkan data lapangan yaitu di UMKM Kecamatan Nusa Penida yang menerapkan QRIS, menyikapi keefektifan penggunaan sistem pembayaran QRIS kode QR.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA